

PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH: MASIHKAH MENJADI TANGGUNG JAWAB UTAMA PKN?

Sekar Purbarini Kawuryan)*

Abstract

For the sustainability of our national life, it is important to have citizens with good character. Education is a vital means for developing students (as citizens) personality. One of the school subject matters that have been given assignment to build the character of the citizens is Pendidikan Kewarganegaraan (PKn or civics). Unfortunately, PKn teaching-learning process which ideally helping student to develop their moral and characters, felt into textual knowledge without deep understanding and good practice. The practices of teaching-learning do not touch the actual moral and ethics issues happening in real social life surrounding the students. For the optimum efforts to developing student moral and character, it is the time for schools to give the assignment of character building and moral development of the student not only to the PKn subject matter, but to all of the subject matters taught at school. Last but not least, great participation in and well organized cooperation between teachers, parents and community for children character bulding should be developed well.

Keywords: *Student moral and character bulding; PKn (Civics); teachers-parents-community cooperation and participation.*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak mulia, baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. Manusia berakhlak mulia, yang memiliki moralitas tinggi, sangat penting untuk segera diwujudkan. Bangsa Indonesia tidak hanya sekedar memancarkan kemilau pentingnya pendidikan, tetapi juga bagaimana merealisasikan konsep pendidikan dengan cara pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan merata (Marihot Manullang, 2010).

Apabila mencermati kondisi bangsa akhir-akhir ini, ketersediaan sumber daya manusia yang berkarakter merupakan kebutuhan yang amat vital. Hal ini perlu segera dilakukan untuk

*)Dosen Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar FIP UNY

mempersiapkan tantangan global dan daya saing bangsa. Selain itu, sampai saat ini sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan di Indonesia masih belum mencerminkan cita-cita pendidikan seperti yang diharapkan dan tertuang dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003. Banyak ditemukan siswa yang menyontek ketika sedang mengerjakan soal ujian, bersikap malas, acuh tak acuh, tawuran antarsesama siswa, melakukan pergaulan bebas, terlibat narkoba, munculnya budaya materialistis, individualis, egosentris, kurang peka, rendahnya kepedulian pada orang lain, sopan santun dan tata krama mulai ditinggalkan, berkurangnya rasa hormat kepada orang tua merupakan contoh kasus-kasus aktual yang tidak sedikit ditemui dari para generasi muda. Salah satu budaya kekerasan yang membuat bangsa Indonesia diklaim sedang kehilangan karakter adalah terjadinya kerusuhan yang melanda Koja Tanjung Priok beberapa waktu yang lalu.

Berdasarkan berbagai fenomena yang sudah diuraikan di atas, pendidikan merupakan upaya paling penting untuk membentuk kepribadian peserta didiknya. Selama ini, pendidikan moral disampaikan secara marjinal. Tanggung jawab pendidikan ini dibebankan pada pelajaran tertentu. Salah satu mata pelajaran yang sejak dahulu 'dititipi' untuk membantu membentuk karakter siswa di sekolah adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan seperti yang sudah dituliskan sebagai judul artikel di atas: masihkah PKn mengemban tanggung jawab utama dalam membentuk karakter siswa di sekolah?

Pendidikan Karakter yang Efektif

Menurut Lickona melalui Khoiruddin Bashori (2010) terdapat 11 prinsip agar pendidikan karakter dapat berjalan efektif sebagai berikut: (1) kembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai kinerja pendukungnya sebagai pondasi karakter yang baik, (2) definisikan 'karakter' secara komprehensif yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku, (3) gunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif dalam pengembangan karakter, (4) ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian, (5) beri siswa kesempatan untuk melakukan tindakan moral, (6) buat kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter, dan membantu siswa untuk berhasil, (7) usahakan mendorong motivasi diri siswa, (8) libatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral untuk berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakter

dan untuk mematuhi nilai-nilai inti yang sama dalam membimbing pendidikan siswa, (9) tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral dan dukungan jangka panjang bagi inisiatif pendidikan karakter, (10) libatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter, (11) evaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan sejauh mana siswa memmanifestasikan karakter yang baik.

Pendidikan karakter yang efektif diharapkan menyertakan usaha untuk menilai kemajuan. Ada tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian (Khoiruddin Bashori, 2010), yaitu: (1) karakter sekolah, sampai sejauh mana sekolah menjadi komunitas yang lebih peduli dan saling menghargai?, (2) pertumbuhan staf sekolah sebagai pendidik karakter, sampai sejauh mana staf sekolah mengembangkan pemahaman tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk mendorong pengembangan karakter?, (3) karakter siswa, sejauh mana siswa memmanifestasikan pemahaman, komitmen, dan tindakan atas nilai-nilai etis inti?. Hal-hal tersebut dapat dilakukan di awal pelaksanaan pendidikan karakter untuk mendapatkan baseline dan diulang lagi di kemudian hari untuk menilai kemajuan.

Pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Moral di Sekolah Saat Ini

Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral. Pendidikan karakter bukan hanya mengajarkan benar dan salah, tetapi juga menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal yang baik. Dengan cara seperti itu, siswa mampu membedakan (ranah kognitif) benar dan salah, mampu merasakan (ranah afektif) nilai yang baik, dan mau melakukannya (ranah psikomotor).

Ada beberapa pakar yang mengembangkan pembelajaran nilai moral dengan tujuan membentuk watak atau karakter anak. Pakar-pakar tersebut diantaranya adalah Newman, Simon, Howe, dan Lickona (Ruminiati, 2007: 1.32). Berdasarkan pendapat keempat pakar tersebut, pendapat Lickona lebih cocok diterapkan dalam membentuk karakter anak. Lickona mengacu pada pemikiran filosof Michael Novak, bahwa watak atau karakter seseorang dibentuk melalui tiga komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Ketiga komponen karakter yang baik (*components of good character*), yaitu *moral knowing* (konsep moral), *moral feeling* (perasaan atau sikap moral), dan *moral behavior* (perilaku bermoral). Konsep moral meliputi kesadaran moral (*moral awareness*), pengetahuan nilai moral (*knowing moral value*), pandangan ke depan (*perspective taking*), penalaran moral (*reasoning*), pengambilan

keputusan (*decision making*), dan pengetahuan diri (*self knowledge*). Sikap moral mencakup kata hati (*conscience*), rasa percaya diri (*self esteem*), empati (*emphaty*), cinta kebaikan (*loving the good*), pengendalian diri (*self control*), dan kerendahan hati (*humility*). Sementara itu, yang termasuk perilaku moral adalah kemampuan (*competence*), kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habbit*).

Ketiga komponen tersebut diperlukan agar siswa mampu memahami, merasakan, dan mengerjakan nilai-nilai kebajikan. *Moral behavior* merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen karakter lainnya. Sebagai contoh, untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam berperilaku moral (*act morally*), harus dilihat tiga aspek seperti uraian di atas, yaitu kemampuan, keinginan, dan kebiasaan. Seorang anak tidak akan dapat melakukan tindakan moral bila ia tidak memiliki kompetensi sosial, berkeinginan dan terbiasa melakukannya. Tindakan moral merupakan sesuatu yang harus dibiasakan pada diri anak sehingga menjadi bagian dari karakternya.

Seperti diketahui bersama, pelaksanaan pendidikan moral di sekolah diberikan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran ini menggantikan istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang telah 'dikubur' dengan adanya Kurikulum Berbasis Kompetensi KBK). Kurikulum 2004 yang disebut sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi telah menghilangkan kata "Pancasila" dari PPKn, sehingga menjadi PKn atau Pendidikan Kewarganegaraan. Demikian juga dalam KTSP 2006, yang dalam struktur programnya, tidak ada lagi kata Pancasila. Apabila PMP dan PPKn lebih menekankan pada pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, agak berbeda dengan PKn paradigma baru yang mengemban tiga fungsi pokok, yaitu *civic intelligence*, *civic responsibility*, dan *civic participation* (Udin Winataputra, 2005: 1.1). Wawasan pelajaran ini begitu luas mencakup delapan ruang lingkup, yaitu Pancasila, Konstitusi Negara, Norma, Hukum, dan Peraturan, HAM, Kekuasaan dan Politik, Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Kebutuhan Warga Negara, dan Globalisasi. Apabila mencermati kedelapan ruang lingkup tersebut, maka yang lebih dikedepankan dari mata pelajaran ini bukan lagi hanya sebatas moral atau karakter saja seperti mata pelajaran sebelumnya (PMP dan PPKn).

Akan tetapi, penyajian materi pendidikan moral di sekolah yang diharapkan dapat membantu membentuk karakter anak, tampaknya lebih berorientasi pada penguasaan materi yang tercantum dalam kurikulum atau buku teks. Selain itu, pembelajarannya juga kurang

mengaitkan isu-isu moral esensial yang sedang terjadi dalam masyarakat, sehingga siswa kurang mampu memecahkan masalah-masalah moral yang terjadi. Pembelajaran yang dilakukan guru juga masih tampak kurang keterpaduan, baik dengan mata pelajaran lain maupun pemilihan model dan strategi pembelajarannya. Bagi sebagian siswa, materi pelajaran PKn dirasakan sebagai beban yang hanya menambah bahan hafalan, tidak dihayati, dirasakan bahkan diamalkan dalam perilaku kehidupan hari-hari. Ironisnya lagi, berdasarkan pengamatan penulis, pelajaran PKn yang tidak termasuk dalam mata pelajaran yang diujikan secara nasional terkadang 'disepelekan', dipandang sebagai pelajaran yang tidak terlalu penting oleh sebagian guru.

Pembelajaran Terpadu: Alternatif Peningkatan Pendidikan Karakter di Sekolah

Selain mata pelajaran yang bentuk dan isinya secara sengaja mengusung pendidikan karakter, seperti pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, seluruh mata pelajaran diharapkan tidak hanya mengajarkan ilmu dan keterampilan, tetapi juga membina sikap dan perilaku siswa. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kematangan moral dan pembentukann karakter siswa secara optimal, maka penyajian materi pendidikan moral kepada para siswa hendaknya dilaksanakan secara terpadu di semua mata pelajaran dan dengan menggunakan strategi dan model pembelajaran yang juga terpadu. Semua guru mata pelajaran diberikan tugas tambahan untuk menganalisa semua aspek yang diajarkan dan dihubungkan dengan pendidikan karakter. Sebagai contoh, guru IPS mengajarkan tentang berbagai jenis budaya. Materi ini akan ditambah dengan bagaimana siswa menghargai budaya yang ada di Indonesia, bagaimana menjaga lingkungan sekitarnya. Demikian juga bagi semua guru mata pelajaran yang ada di sekolah.

Untuk mengembangkan strategi dan model pembelajaran pendidikan moral dengan menggunakan pendekatan terpadu, diperlukan adanya analisis kebutuhan (*needs assessment*) siswa dengan serangkaian kegiatan (Lewa Karma, 2004) antara lain: (1) mengidentifikasi isu-isu sentral yang bermuatan moral dalam masyarakat untuk dijadikan bahan kajian dalam proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode klarifikasi nilai, (2) mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan siswa dalam pembelajaran pendidikan moral agar tercapai kematangan moral yang komprehensif yaitu, kematangan dalam pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral, (3) mengidentifikasi dan menganalisis masalah-

masalah dan kendala-kendala instruksional yang dihadapi oleh para guru di sekolah dan para orang tua murid di rumah dalam usaha membina perkembangan moral siswa, serta berupaya memformulasikan alternatif pemecahannya, (4) mengidentifikasi dan mengklarifikasi nilai-nilai moral yang inti dan universal yang dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam proses pendidikan moral, (5) mengidentifikasi sumber-sumber lain yang relevan dengan kebutuhan belajar pendidikan moral.

Karakter yang baik mencakup pengertian, kepedulian, dan tindakan berdasarkan nilai-nilai etika inti. Karenanya, pendekatan holistik dalam pendidikan karakter berupaya untuk mengembangkan keseluruhan aspek kognitif, emosional, dan perilaku dari kehidupan moral. Siswa memahami nilai-nilai inti dengan mempelajari dan mendiskusikannya, mengamati perilaku model, dan mempraktekkan pemecahan masalah yang melibatkan nilai-nilai. Siswa belajar peduli terhadap nilai-nilai inti dengan mengembangkan keterampilan empati, membentuk hubungan yang penuh perhatian, membantu menciptakan komunitas bermoral, mendengar cerita ilustratif dan inspiratif, dan merefleksikan pengalaman hidup (Khoiruddin Bashori, 2010).

Pentingnya Kerja Sama Orang Tua, Guru, dan Masyarakat

Tidak perlu disangsikan lagi, bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak, baik keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter tidak akan berhasil tanpa adanya kesinambungan dan keharmonisan semua pihak. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan karakter pertama dan utama harus lebih diberdayakan. Pendidikan di lingkungan keluarga yang mulai sedikit diabaikan karena dipercayakan penuh kepada lingkungan sekolah harus dibenahi kembali.

Sekolah merupakan salah satu lembaga yang bertanggungjawab terhadap pembentukan karakter pribadi anak, bagaimana seorang siswa pintar dan cerdas sebagaimana diharapkan oleh orang tuanya.. Peran dan kontribusi guru sangat dominan. Tugas seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Harapannya, siswa tidak hanya memiliki kecerdasan kognitif, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Guru atau pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral karena guru merupakan teladan bagi para siswa (Nur Arifah D., 2010). Guru berperan sebagai model atau contoh bagi siswa. Oleh karena itu tingkah laku pendidik, baik guru, orang tua maupun

tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara serta nilai-nilai Pancasila.

Di samping itu, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pendidikan di masyarakat. Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi karakter dan watak seseorang. Masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai etika dan estetika untuk pembentukan karakter. Menurut Quraish Shihab (1996: 321), situasi kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya, mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan. Jika sistem nilai dan pandangan masyarakat terbatas pada kini dan di sini, maka upaya dan ambisinya juga terbatas pada hal yang sama. Masyarakat di luar lembaga pendidikan, seperti keluarga, masyarakat umum, dan negara, juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dalam konteks kehidupan peserta didik.

Akan tetapi, kerja sama dan keterlibatan ketiga pihak tersebut sampai saat ini masih belum sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan adanya kenyataan bahwa peserta didik sering dihadapkan dengan nilai-nilai yang bertentangan. Di satu sisi, siswa dididik untuk bertingkah laku yang baik, jujur, hormat, hemat, rajin, disiplin, sopan, tetapi di sisi lain pada saat yang bersamaan, siswa dipertontonkan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang sudah dipelajari oleh orangtua, lingkungan, bahkan oleh gurunya sendiri. Sebagai contoh, hukuman atau sanksi pelanggaran tata tertib sekolah hanya berlaku untuk siswa. Siswa dilarang melakukan kekerasan tetapi sebaliknya, banyak guru melakukan kekerasan terhadap siswa. Guru perokok melarang anak didiknya merokok, dan masih banyak peristiwa yang merusak citra profesi guru. Hal-hal yang bertolak belakang inilah yang menyebabkan peserta didik kesulitan dalam mencari figur teladan yang baik di lingkungannya, termasuk di sekolah.

Keteladanan dan pembiasaan orang tua di rumah dan guru di sekolah adalah metode yang paling efektif untuk menumbuhkan akhlaqul karimah pada anak-anak (Lili Pramudji, 2008). Guru diharapkan mampu menjadi model dalam pembelajaran pendidikan moral, baik pendidikan moral kebangsaan (nasionalisme) maupun pendidikan moral keagamaan (akhlaq). Kegiatan pembiasaan dapat diintegrasikan pada proses pembelajaran di sekolah, misalnya gotong royong, bhakti sosial, shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an. Beberapa contoh kegiatan tersebut wajib diikuti oleh warga sekolah, termasuk guru, sehingga dalam hal ini peran guru tidak hanya sebagai "penganjur yang baik" kepada anak didiknya.

Oleh karena itu, sekolah dan keluarga perlu meningkatkan efektivitas kemitraan dengan merekrut bantuan dari komunitas yang lebih luas, seperti organisasi pemuda dan lembaga keagamaan dalam mempromosikan pembangunan karakter. Kemitraan sekolah-orang tua ini diharapkan tidak lagi terlalu banyak menekankan pada penggalangan dukungan finansial, akan tetapi lebih ditujukan pada dukungan program. Berbagai pertemuan yang dilakukan tidak lagi terjebak pada tawar-menawar sumbangan, tetapi bagaimana sebaiknya pendidikan karakter dilakukan bersama antara keluarga dan sekolah.

Dalam pendidikan karakter penting sekali dikembangkan nilai-nilai etika inti, seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain. Selain itu juga mencakup nilai-nilai kinerja pendukungnya, seperti ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan sebagai basis karakter yang baik (Khoiruddin Bashori, 2010). Sekolah harus berkomitmen untuk mengembangkan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai tersebut, mendefinisikannya dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan sekolah sehari-hari, mencontohkan nilai-nilai itu, mengkaji dan mendiskusikannya, menggunakannya sebagai dasar dalam hubungan antarmanusia, dan mengapresiasi manifestasi nilai-nilai tersebut di sekolah dan masyarakat. Semua komponen sekolah bertanggung jawab terhadap standar-standar perilaku yang konsisten sesuai dengan nilai-nilai inti.

Penutup

Karakter yang baik merupakan salah satu sifat yang diharapkan dimiliki oleh siswa sebagai peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan karakter sedini mungkin sudah diperkenalkan pada peserta didik untuk menghasilkan sumber daya yang bermutu sesuai dengan tujuan pendidikan. Karakter lebih dititikberatkan pada watak, perangai, perilaku atau bisa disebut juga tata krama dan etika. Jadi, pendidikan karakter secara sederhana diartikan sebagai penanaman nilai-nilai akhlak, tata krama, bagaimana berperilaku yang baik kepada seseorang. Pada perkembangannya, pendidikan karakter melalui mata pelajaran PKn tidak lagi cukup untuk membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian yang baik. Untuk itu, dibutuhkan keterlibatan dan kerja sama dari orang tua, guru, dan masyarakat. Selain itu, keterpaduan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah juga merupakan upaya yang harus terus menerus ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Khoiruddin Bashori. (2010). *Menata Ulang Pendidikan Karakter Bangsa*. Media Indonesia.com, diunduh pada tanggal 3 Mei 2010.
- Lewa Karma. (2004). *Merancang Pendidikan Moral dan Budi Pekerti*. Artikel Pendidikan Network, diunduh pada tanggal 30 April 2010.
- Lickona, Thomas. (1991). *Educating for Character*. New York: Bantam Books.
- Lili Pramudji. (2008). *Pendidikan Moral, Kompetensi Kepribadian Guru, dan Sertifikasi*, diunduh pada tanggal 30 April 2010
- Marihot Manullang. (2010). *Grand Design Pendidikan Karakter Bangsa*. Harian Sinar Indonesia Baru, diunduh pada tanggal 30 April 2010.
- Nur Arifah D. (2010). *Peranan Guru dalam Pendidikan Karakter, Budaya, dan Moral*, diunduh pada tanggal 5 Mei 2010.
- Udin S. Winataputra. (2005). *Materi dan Pembelajaran PKN SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ruminiati. (2007). *Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan SD*. Jakarta: Depdiknas.